

“Banking” Weekly Hotlist

(10 Juli – 14 Juli 2017)

PENJAMINAN SIMPANAN

Hingga Mei 2017, LPS Jamin 212,6 Juta Rekening Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan yang dijamin pada bank umum per Mei 2017. Total rekening simpanan yang dijamin mencapai 212.680.776 rekening atau tumbuh 5.795.353 rekening (2,8%) dibanding posisi April 2017 yang sebanyak 206.885.423 rekening. Untuk simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat 2,8% month-on-month (MoM), dari 206.646.208 rekening (April 2017) menjadi 212.439.502 rekening (Mei 2017). Jumlah nominal simpanannya juga meningkat sebesar 0,8% (MoM), dari posisi akhir April 2017 dengan jumlah nominal simpanan sebesar Rp2.125 triliun menjadi Rp2.143 triliun per akhir Mei 2017. Sedangkan untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya naik 0,86% (MoM), dari 239.215 rekening per April 2017 menjadi 241.274 rekening per Mei 2017. Sementara itu, untuk jumlah nominal simpanan juga meningkat sebesar 2,56% (MoM), dari Rp2.887 triliun pada April 2017 menjadi Rp2.961 triliun per Mei 2017.

Berdasarkan jenis simpanannya, yaitu giro, tabungan dan deposito, jenis simpanan yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi adalah tabungan. Kenaikannya mencapai 2,89% dari 200.067.228 rekening pada April 2017 menjadi 205.851.342 rekening pada bulan Mei 2017. Sementara itu, kenaikan nominal simpanan tertinggi adalah giro sebesar 4,32 persen. Dari Rp1.183 triliun di bulan April 2017 menjadi Rp1.235 triliun di Mei 2017.

Bila dilihat dari jenis mata uang, jumlah rekening simpanan dan nominal simpanan yang dijamin dalam Rupiah meningkat. Sedangkan untuk jumlah rekening simpanan dalam valas menurun dari bulan sebelumnya, sedangkan nominal simpanan yang dijamin dalam valas meningkat. Peningkatan jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam Rupiah adalah sebesar 2,82% (MoM), dimana per akhir April 2017 berjumlah 205.839.433 rekening, menjadi 211.637.811 rekening per akhir Mei 2017. Untuk jumlah rekening simpanan dalam valas

menurun, di mana per April 2017 jumlahnya 1.045.990 rekening, kemudian menjadi 1.042.965 rekening di akhir Mei 2017.

Jika dilihat dari nominalnya, simpanan dalam Rupiah naik 1,66% (MoM), dari sebesar Rp4.284 triliun per akhir April 2017 menjadi Rp4.355 triliun per Mei 2017. Untuk simpanan dalam valas, jumlahnya juga meningkat sebesar 2,77% (MoM) dari sebesar Rp729 triliun pada April 2017 menjadi Rp749 triliun per Mei 2017.

Sedangkan untuk total simpanan di bank umum per Mei 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp91,1 triliun atau 1,82 persen (MoM) bila dibandingkan dengan posisi akhir April 2017 yang nilainya menjadi sebesar Rp5.104 triliun. Adapun bank umum peserta penjaminan per Mei 2017 berjumlah 115 bank. Terdiri dari 102 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah. Bank umum konvensional, terdiri dari 4 Bank Pemerintah, 25 Bank Pemerintah Daerah, 64 Bank Umum Swasta Nasional dan 9 Kantor Cabang Bank Asing.

(Sumber: Infobank, 12 Juli 2017)

LPS Usul Besaran Premi Restrukturisasi 0,005% dari DPK

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan besaran premi restrukturisasi perbankan (PRP) sebesar 0,005% dari total dana pihak ketiga (DPK). Namun, besaran angka ini masih dalam proses pengkajian dengan beberapa pihak terkait seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Iuran premi restrukturisasi perbankan yang diajukan sebesar 0,005 persen dari total DPK ini dengan target dana hingga mencapai 2 persen sampai 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini sesuai dengan patokan IMF. Dengan target itu, setidaknya LPS punya patokan walaupun dalam kenyataannya dampak krisis itu bisa mengeluarkan biaya dengan persentase dari PDB yang lebih besar.

Dengan iuran PRP yang sebesar 0,005% itu, maka dalam satu periode perbankan hanya akan mengumpulkan dana PRP sekitar Rp250 miliar dengan asumsi DPK perbankan sekitar Rp5.000 triliun. Jumlah iuran itu sangat kecil dengan target 2-3% PDB. Kalau PDB Indonesia sekitar Rp12.000 triliun sekitar Rp240 triliun.

Sementara terkait dengan keberatan industri perbankan mengenai iuran PRP itu, premi itu harus dilakukan karena sesuai dengan amanat undang-undang. LPS juga tengah memikirkan

berbagai solusi agar industri perbankan tidak terbebani dengan adanya PRP tersebut. Dilihat secara masing-masing bank di Indonesia sangat segmentif sekali. Jadi, ada yang kondisinya cukup berat, ada yang *cover* likuiditas, ada yang kekurangan likuiditas. Untuk itu LPS . terus berkomunikasi dengan KSSK dan OJK. *Gap* antara bank umum kegiatan usaha (BUKU) I dan II dengan bank BUKU III dan IV harus dipersempit.

(Sumber: Infobank, 11 Juli 2017)

KINERJA PERBANKAN

Rentabilitas Bank: Membaik Meski Belum Pulih

Tingkat rentabilitas, atau kemampuan bank dalam menghasilkan laba, masih mendapatkan tantangan berat pada tahun ini akibat laju pertumbuhan kredit yang belum sepenuhnya pulih. Kendati pertumbuhan kredit pada semester I/2017 diyakini akan menembus dua digit, legih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 8,88%, perbankan menilai kinerja pada paruh pertama tahun ini belum optimal.

“Diproyeksikan rentabilitas industri perbankan pada paruh kedua tahun 2017 masih akan mendapat sejumlah tantangan, sebagaimana yang terjadi pada semester sebelumnya. Secara umum ada tiga faktor yang berpotensi menjadi kendala bagi perbankan dalam merealisasikan targetnya, yakni rasio kredit bermaslah (NPL), permintaan kredit yang masih lemah, serta biaya operasional yang tinggi. Secara khusus bagi BCA, masalah permintaan kredit yang belum terlalu tinggi dianggap menjadi tantangan yang perlu disiasati. Realisasi penyaluran kredit per Juni 2017 tercatat tumbuh 12% (yoy). Sampai akhir tahun nanti, BCA membidik pertumbuhan kredit pada level 11%-12%”. (Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank BCA)

“Tingkat rentabilitas bank hingga saat ini telah sesuai dengan teget. Permintaan kredit terutama KPR tergolong stabil bahkan cenderung meningkat. Demikian pula, risiko kredit juga telah diantisipasi sehingga diharapkan perolehan laba dapat terjaga. Sepanjang semester I/2017, BTN mencatatkan pertumbuhan kredit di kisaran 18% - 20%, dengan rasio NPL *gross* di level 3,2%”. (Maryono, Direktur Utama Bank BTN).

“Tingkat rentabilitas perbankan belum normal. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba pada semester II/2017 ini menurun

dibandingkan dengan paruh pertama. Bisnis perbankan belum sehat sehingga *profit* itu istilahnya masih belum normal. Yang penting setidaknya kami bisa bertahan". (Edy Kuntardjo, Direktur Utama Bank Ina Perdana).

(Sumber: Bisnis Indonesia, 10 Juli 2017, hal.23)

Transaksi Tunai vs Nontunai Makin Dekat ke *Less Cash Society*

Geliat transaksi nontunai berpotensi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya saluran untuk bertransaksi tanpa uang tunai. Transaksi nontunai sudah menggeliat sejak tahun 2011 dan konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit sampai saat ini. Data BI menyebutkan sampai Mei 2017 menyebutkan tren transaksi nontunai yang terdiri atas kartu debit lewat transaksi belanja, dan uang elektronik mengalami kenaikan sebesar 14,54% menjadi 1,3 miliar kali dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dari segi nominal, transaksi nontunai mencatatkan kenaikan sebesar 12,8% menjadi Rp 1.574 triliun.

Dari sisi lain, volume transaksi tarik tunai, baik dengan kartu debit maupun kredit mengalami penurunan untuk pertama kalinya pada periode 2009 – 2017 sebesar 0,71% menjadi 1,38 miliar kali. Meskipun dari segi volume mengalami penurunan, tetapi dari segi nominal masih tumbuh dengan tren melambat setelah hanya naik 6,81% menjadi Rp 1.000,84 triliun. Persentase itu jauh lebih rendah ketimbang pertumbuhan nominal transaksi tunai pada Mei 2016 yang naik sebesar 12,19%.

(Sumber: Bisnis Indonesia, 10 Juli 2017, 24)

Kondisi Likuiditas di tengah Perebutan Dana Masyarakat

Pemerintah tengah gencar menerbitkan surat utang untuk mengurangi defisit anggaran yang terus membengkak, lantaran digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah Jokowi. Hal ini, dikhawatirkan akan memicu pengetatan likuiditas di perbankan. Tak tanggung-tanggung, uang masyarakat yang terkumpul dari penerbitan surat utang yang dilakukan pemerintah mencapai puluhan hingga ratusan triliun. Padahal, saat ini perbankan didorong untuk dapat memperbesar penyaluran kreditnya ke sektor riil. Tumbuhnya

sektor ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi yang masih lesu. Namun demikian, untuk bisa memperbesar penyaluran kreditnya ke sektor riil perbankan juga membutuhkan sumber dana, satu di antaranya berupa dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat. Dalam hal ini, perbankan pun tengah bersaing dengan pemerintah dalam memperebutkan dana masyarakat itu.

Gencarnya pemerintah yang menerbitkan surat utang ini, dikhawatirkan dana masyarakat yang ada di bank akan ditarik, sehingga akan menimbulkan pengetatan likuiditas di perbankan. Kendati demikian, menurut Bank Indonesia (BI) saat ini, rasio kredit terhadap simpanan atau *loan to deposit ratio*/LDR perbankan sudah menurun menjadi kisaran 88-89. Hal ini menunjukkan, bahwa kondisi likuiditas perbankan masih berada di level yang aman, meski tetap ada kekhawatiran dari industri bahwa pengetatan likuiditas masih menjadi momok di tahun ini. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan nasional yang masih melambat atau masih single digit dikisaran 8 persen. Kendati demikian, diyakini likuiditas yang disedot oleh pemerintah akan dengan cepat disalurkan kembali ke sektor riil melalui pembangunan infrastruktur. Uang yang dikeluarkan untuk gaji pegawai negara sipil (PNS) juga akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang berlanjut ke konsumsi rumah tangga. Dengan begitu, ekonomi nasional akan ikut tertopang.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan, untuk mencegah perebutan dana masyarakat antara pemerintah dan perbankan, pihaknya bersama regulator lainnya yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah terus melakukan koordinasi. Hasil dari koordinasi yang telah dilakukan dua lembaga dan pemerintah ini diklaim telah membuat kondisi likuiditas tak lagi mengetat seperti yang dirasakan tahun lalu. Belum lama ini, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan aturan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) dari harian menjadi rata-rata (*averaging*). Bank tidak akan lagi diwajibkan untuk menyimpan 6,5% dana nasabah di BI setiap hari. Bank hanya berkewajiban 5% dana nasabah di BI setiap hari, sedangkan sisanya 1,5 persen dihitung rata-rata per dua minggu. Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan likuiditas perbankan lebih fleksibel, dan melonggarkan likuiditas. Adapun kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang GWM bank umum dalam rupiah dan valuta asing (valas) bagi bank umum konvensional. PBI ini merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 15 Tahun 2013.

(Sumber: Infobank, 14 Juli 2017)

Ini 5 Masalah yang Gerogoti BPR Secara Internal

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, baik dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, di antaranya adalah keterbatasan modal, tata kelola (*Good Corporate Governance-GOG*), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga, serta produk dan layanan yang belum variatif. Sedangkan dari sisi eksternal sendiri tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin meningkat. Saat ini segmen mikro dan kecil yang selama ini merupakan target pasar BPR juga dilayani oleh lembaga jasa keuangan lain selain bank seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam, *credit union*, dan Fintech. Sehingga persaingan pada sektor mikro dan kecil menjadi sangat ketat.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, OJK menerbitkan rangkaian ketentuan yang memperkuat pengaturan kelembagaan, *prudential banking*, teknologi informasi, manajemen risiko dan tata kelola (GCG), dan kegiatan usaha yang sesuai dengan kapasitas permodalan BPR, serta kajian pengembangan produk dan layanan serta strategi *branding* BPR. Adapun, berbagai kajian juga dilakukan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK guna penguatan internal BPR. Kajian tersebut meliputi kajian pengembangan produk dan layanan BPR yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yaitu produk dan layanan BPR berbasis jasa dan teknologi informasi, pengembangan produk tabungan sesuai siklus kehidupan, model skema generik kredit di sektor produktif. Dari sisi bisnis, pengembangan produk dan layanan tersebut perlu didukung dengan strategi *branding* BPR untuk mendorong imej BPR yang positif dan profesional, sehingga lebih dikenal di masyarakat dan mampu menghadapi persaingan yang ada.

(Sumber: Bisnis Indonesia, 10 Juli 2017, 24)
